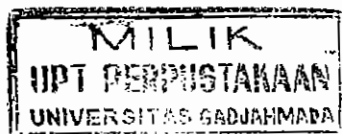


Hegemoni Amerika Pasca 11/9: Menuju Sebuah 'Imperium Amerika Baru'?

Nur Rachmat Yuliantoro*

Abstract



Post-9/11 American foreign policy has been viewed by many as, if anything, reactualising American grand strategy to form a 'new American Empire'. This is arguably the greatest ideal long imagined by some groups of 'neo-conservatives' that dominating Bush's foreign policy. These groups believe that the United States, supported by its military and economic supremacy, is the uncontested 'leader' of today's world. Their belief has of course been contested by those scholars who argue that building an 'empire' would only weaken – some even say 'destroy' – U.S. dominant position in international relations. This essay tries to describe in brief both groups' arguments, while also stressing that the first choice of imperial hegemony is the worst not only for the U.S., but also for the international community.

Kata-kata kunci:

politik luar negeri; hegemoni; kesetimbangan kekuatan.

* Nur Rachmat Yuliantoro adalah staf pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, Yogyakarta.

"The fact that hegemons invariably are brought low demonstrates a paradoxical truth of international politics: when a state wins too much, it loses."

C. Layne (1998)

"There have always been limits to U.S. power, and the question today is when and how the U.S. will acknowledge this reality."

G. Kolko (2003)

Politik luar negeri Amerika Serikat (AS) di awal abad ke-21 dipandang cenderung lebih memperkuat peran hegemonik Amerika di dunia daripada sebelumnya (Granger, 2003). Banyak analisis politik luar negeri AS akan merujuk pada pembentukan *the Project for the New American Century* (PNAC) di tahun 1997 sebagai titik perubahan yang paling penting. Dibentuk oleh sejumlah tokoh neokonservatif berpengaruh dan para pendukung *military-industrial complex*, PNAC berusaha keras untuk merumuskan 'politik luar negeri AS pasca-perang dingin yang diperbarui'. 'Politik luar negeri yang diperbarui' ini ditujukan untuk mempertahankan dan memajukan supremasi Amerika di segala bidang dengan segala cara, dengan sebuah 'imperium Amerika yang baru' menjadi tujuan utamanya. Menyusul serangan 11 September 2001 (untuk selanjutnya disebut 11/9), mereka yang disebut sebagai 'sayap kanan' dari pemerintahan Bush telah menggunakan 'perang melawan terorisme' untuk memajukan ide radikal mereka bahwa hegemoni Amerika harus diperkuat untuk mencapai prinsip utama dari supremasinya, yaitu keunggulan tak tertandingi di semua aspek. Apa yang mereka inginkan adalah sebuah dunia yang *unipolar*, di mana AS *"imposes the rules but, because of its own self-evident goodness, is not necessarily bound by them"* dan boleh bertindak secara sepihak, jika tindakan sepihak itu dapat melayani kepentingan Amerika (Barry dan Lobe, 2002).

Kehendak kuat bagi sebuah 'imperium Amerika baru' didukung oleh fakta supremasi AS di bidang budaya, militer, dan – dalam tingkat yang sedikit lebih rendah – ekonomi. Di awal tahun 1999, Menteri Luar

Negeri Perancis Hubert Vedrine menyebut AS sebuah "hyper-power" dengan menggambarkan sebagai "predominates on the economic level, the monetary level, on the technological level, and in the cultural area in the broadest sense of the world ... It is not comparable, in terms of power and influence, to anything known in modern history" (Ikenberry, 2001:17). Amerika Serikat tidak diragukan lagi adalah kekuatan militer terbesar di dunia, dengan anggaran belanja militer senilai hampir 40 persen dari total anggaran belanja militer dunia dalam sepuluh tahun terakhir (Eland, 2002; Covarrubias, 2003).¹ Meskipun mengalami resesi, ekonomi AS tetap lebih besar daripada gabungan tiga ekonomi terbesar berikutnya. AS menggunakan kekuatan ekonomi relatif dan dominasi militernya sebagai sarana utama mendapatkan hegemoni dan melindungi kepentingannya.²

PNAC yakin bahwa inilah saatnya bagi tegaknya sebuah *Pax Americana* dengan dukungan militer yang sangat kuat. Postur kekuatan militer AS yang kuat tampaknya tidak lagi bergantung pada *containment policy*, *balance of power*, atau persetujuan-persetujuan internasional yang bisa memblokir kebebasan AS untuk bertindak. Inilah yang dinilai oleh banyak analis sebagai strategi besar ganda AS, yaitu untuk mempertahankan supremasi di politik dunia dan untuk melindungi negara serta penduduknya (Kelly, 2003).

Meski demikian, ada pula sejumlah tokoh utama dalam politik luar negeri AS yang menentang tujuan-tujuan PNAC. Mereka berargumen bahwa penekanan pada peran hegemonik AS yang lebih besar melalui aksi militer akan membahayakan kepentingan AS sendiri. Menurut mereka, alih-alih memperkuat peran hegemonik, tindakan sepihak akan membuat 'runtuhnya hegemoni Amerika' lebih

¹ Perlu dicatat bahwa anggaran belanja militer AS di tahun 2003 saja adalah \$396 miliar, yang lebih besar daripada gabungan anggaran belanja 15 negara setelahnya!

² Menurut Niall Ferguson, keyakinan bahwa dominasi militer membuat AS menjadi negara terkuat di dunia mungkin saja benar bila kekuatan ekonomi dan lembaga-lembaga politik mendukung kemampuan militer. Jika kekuatan ekonomi melemah dan lembaga-lembaga politik tidak lagi mampu meyakinkan warga AS untuk mendukung tindakan militer, maka kekuatan militer hampir-hampir tidak ada artinya. Untuk lebih jelasnya lihat Ferguson, 'Power', *Foreign Policy*, No. 134, January/February 2003, pp. 18-9.

mendekati kenyataan. Sejalan dengan argumen mereka, esai ini percaya bahwa hegemoni Amerika mempunyai batas tertentu sehingga usaha membuat sebuah 'imperium Amerika baru' sangat sulit terwujudkan. Sebuah 'imperium Amerika baru' oleh karenanya adalah sesuatu yang tidak rasional. AS boleh menjadi satu-satunya negara adikuasa saat ini, tetapi ia harus menyadari bahwa 'hegemon yang ramah' (*benign hegemon*), bukan yang 'agresif', relatif akan lebih diterima oleh masyarakat internasional.

Esai ini akan menguraikan secara singkat perdebatan dalam politik luar negeri AS dewasa ini mengenai hegemoni Amerika. Dalam bagian-bagian berikut, esai ini akan menyampaikan argumen mereka yang memimpikan sebuah 'imperium Amerika baru' dan mereka yang yakin bahwa ada sejumlah batas dan harga yang harus dibayar jika AS memperkuat hegemoninya melalui tindakan militer sepihak. Mengingat pemahaman atas konsep hegemoni adalah suatu keharusan untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik tentang 'imperium Amerika baru', esai ini akan dimulai dengan diskusi singkat tentang hegemoni.

Apakah Hegemoni Itu?

Konsep hegemoni telah menarik perhatian banyak peneliti sejak awal dekade 1970-an, ketika muncul asumsi-asumsi mengenai tanda-tanda runtuhnya kepemimpinan AS sebagaimana dicatat oleh Rapkin (1990:1). Sejak saat itu, perdebatan akademis mengenai kepemimpinan hegemonik berlangsung seiring dengan perdebatan tentang runtuhnya hegemoni Amerika. Banyak literatur telah mencatat perdebatan tentang pengertian hegemoni dan bagaimana negara-negara hegemonik menjalankan kekuatan mereka.

Apakah hegemoni itu? Istilah 'hegemoni' diturunkan dari sebuah kata Yunani yang sederhananya berarti 'kepemimpinan' (Loh, 2003). Dari pengertian sederhana ini muncul setidaknya dua aliran pemikiran tentang hegemoni: realis dan materialis sejarah. Secara umum, aliran realis melihat hegemoni sebagai "*preponderance of material resources*" yang pada gilirannya akan memberikan sarana bagi sang hegemon untuk mengatur politik dan ekonomi dunia (Keohane sebagaimana dikutip dalam Ikenberry, 1989:378). Dengan kata lain, kebanyakan pemikir realis (terutama Charles Kindleberger dan Robert Keohane)

memberikan penekanan pada kemampuan materi (kekuatan militer dan ekonomi) untuk mempertahankan hegemoni. Di sisi lain, aliran materialis sejarah memandang kekuatan sosial, nilai, teori, norma, dan ideologi sama pentingnya dengan kekuatan militer dan ekonomi bagi sebuah negara untuk mendapatkan dan menjalankan hegemoni. Berasal dari pemikiran Antonio Gramsci, makna hegemoni yang terakhir ini kemudian dikembangkan oleh (khususnya) Robert Cox. Kedua aliran tersebut menggunakan istilah hegemoni sebagai merujuk kepada sebuah peran negara dan semacam tata internasional. Namun, hal ini mengarah pada sebuah pertanyaan menarik: apakah dunia memang membutuhkan sebuah negara hegemon untuk memperoleh sebuah tata internasional? Para teoritis kestabilan hegemonik menekankan perlunya 'Great Power' tunggal untuk membangun dan mempertahankan ketertiban dunia. Pada waktu yang sama, 'Great Power' ini harus dicegah dari keruntuhan, karena hal itu akan membahayakan ketertiban dunia. Mereka berargumen bahwa sepanjang sejarah, selalu ada satu negara dominan, hegemonik, yang menjamin keberlangsungan hubungan internasional (Ikenberry, 1989: 377).

Para ilmuwan umumnya dikelompokkan menjadi dua ketika mendiskusikan bagaimana negara hegemon itu seharusnya menjalankan kekuasaannya. Di kelompok yang pertama, ada orang seperti Kindleberger (1981) yang melihat bahwa kekuatan hegemonik sesungguhnya adalah kekuatan yang 'ramah'; kepemimpinannya akan membawa dunia menuju ketertiban dan keuntungan bersama. Di kelompok yang kedua, sejumlah ilmuwan percaya bahwa negara hegemon cenderung memaksakan aturan dan kehendak demi memperkuat posisi politik dan ekonominya sendiri (Krasner, 1976). Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa baik postur 'ramah' ataupun 'agresif' yang ditunjukkan oleh sebuah hegemon dalam menjalankan kekuasaannya, kekuasaan itu haruslah sah. Dalam kata-kata Ikenberry dan Kupchan, "*hegemonic power is based upon right as well as might*" (1990:49). Beberapa pemikir realis – bahkan termasuk di antaranya Hans Morgenthau (1967:87-8) – juga menerima pentingnya ideologi dan norma (yang disebut oleh Robert Gilpin sebagai '*prestige*') dalam membangun dan menjalankan kekuatan hegemonik.

Diskusi tentang hegemoni dan posisi AS sebagai satu-satunya adikuasa sejak hancurnya Uni Soviet khususnya berpusat pada keamanan nasional Amerika. Konsep keamanan kiranya adalah poin terpenting dari *grand strategy* setiap negara, yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai "*the process by which a state matches ends and means in the pursuit of security.*" (Layne, p. 8). Dalam kasus Amerika Serikat, banyak yang percaya bahwa dewasa ini AS menjalankan *grand strategy* yang sama sejak tahun 1945, yaitu '*the strategy of preponderance*' atau hegemoni. Mengingat setiap aksi hegemonik niscaya akan mempercepat munculnya tantangan-tantangan dari kekuatan utama yang baru, strategi hegemoni AS meliputi pula upaya mencegah bangkitnya kekuatan utama tandingan. Upaya pencegahan ini dibutuhkan guna memaksimalkan dan mempertahankan dominasi Amerika dalam politik dan ekonomi internasional.

Serangan 11/9 telah memperkuat pembenaran AS untuk mencapai tujuan hegemoniknya, yaitu dominasi geopolitik dan ekonomi di dunia. Para *hawkish* dalam pemerintahan Bush telah menggunakan 'perang melawan terorisme' sebagai 'unjuk kekuatan' Amerika untuk mencapai hegemoni yang lebih besar atau, sebagaimana telah lama diduga banyak pihak, sebuah 'imperium Amerika baru'. Jika tercapai, ia adalah sebuah 'kemenangan dari kekuatan Amerika'. Pandangan semacam ini tentu saja segera menuai banyak penentangan, yang bukan saja datang dari sekutu-sekutu AS di Eropa (kecuali Inggris), tetapi juga dari dalam negeri AS sendiri. Para penentang ini khususnya mempertanyakan '*the lack of right*' dalam doktrin politik luar negeri Bush, sesuatu yang akan menghancurkan imaji Amerika sebagai 'hegemon yang ramah' dewasa ini.

Ide 'Imperium Amerika'

Peringatan dari sejumlah tokoh politik luar negeri terkemuka bahwa AS sedang mendekati 'masa neo-isolasionisme yang diperbarui' di bawah kepresidenan Bush segera menjadi mentah dengan serangan 11/9. Sejak itu Bush telah menjalankan sejumlah kebijakan luar negeri 'internasionalis' yang membuatnya dipersamakan dengan presiden AS yang paling internasionalis sejauh ini, yaitu Woodrow Wilson (Lansford, Watson, dan Hillard, 2003). Misi demokratik Amerika pertama kali disematkan kepada Wilson, "*a man who believed that only by interfering*

in the affairs of other nations could the United States wage its campaign of self-determination for all peoples." (Chace, 2002:5). Doktrin Bush tentang unilateralisme dan *preemptive actions* sejalan dengan visi Wilson. Penekanan terhadap unilateralisme lebih jauh disampaikan oleh Bush dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 29 Januari 2002: dalam merespon apa yang disebutnya sebagai "*an axis of evil*", Amerika "*will do what is necessary to ensure our nation's security.*"

Strategi politik luar negeri "*go it alone*" Bush³ sesungguhnya dikembangkan dari jaringan kerja konservatif sayap-kanan yang sering disebut sebagai 'neo-imperialis' atau 'neokonservatif'. Kepedulian utama kaum konservatif ini tentu saja mempertahankan dengan segala cara dominasi Amerika dalam sistem internasional (Hirsh, 2002:25). Beberapa di antara mereka bahkan lebih berani dengan menginginkan terbentuknya sebuah imperium Amerika yang didukung oleh kekuatan militer yang tak tertandingi. (Foster, 2003:2).

Pandangan di atas sejatinya bukanlah sesuatu yang baru. Martin Walker (1996, h. 16) menyebutkan bahwa selalu ada satu opini umum yang tetap di Amerika sepanjang setengah abad terakhir, yaitu bahwa Amerika seharusnya berperan secara aktif dalam urusan-urusan dunia. Pandangan ini berangkat dari fakta bahwa dengan mengesampingkan kejatuhan ekonomi relatif yang dialaminya selama dua puluh tahun terakhir, AS telah menjadi kekuatan militer terbesar di dunia sejak berakhirnya perang dingin. Kecurigaan dan perselisihan menyejarah antara Russia dan China akan menjadikan pembentukan sebuah aliansi untuk menantang hegemoni Amerika hampir tidak mungkin. Apa yang akan disaksikan oleh dunia menyusul semua dominasi AS adalah sebuah 'imperium Amerika baru'.

³ Beberapa analis politik luar negeri AS telah lama menegaskan bahwa Amerika sesungguhnya mempunyai ambivalensi bukan saja pada kebijakan-kebijakan sepihaknya, tetapi juga dalam skema-skema multilateral yang diikutinya sejak masa Clinton. Untuk diskusi yang lebih lengkap tentang masalah ini, lihat Carnegie Council on Ethics and International Affairs, *Multilateralism and U.S. Foreign Policy: Ambivalent Engagement*, February 5, 2002, <<http://www.cceia.org/viewMedia.php?prmTemplateID=8&prmID=127>> dan *Unilateralism and U.S. Foreign Policy*, April 24, 2003, <<http://www.cceia.org/viewMedia.php?prmTemplateID=8&prmID=933>>.

Apa yang dikatakan Walker di atas tampaknya lebih relevan hari-hari ini ketika banyak ilmuwan bersama-sama mengembangkan ide tentang Amerika sebagai sebuah 'imperium baru' setelah serangan 11/9. Di antara mereka adalah dua orang mantan *National Security Adviser*, Henry Kissinger dan Zbigniew Brzezinski, yang sebenarnya sudah menganjurkan ide itu sekian lama. Kissinger telah berulang kali mengatakan bahwa dunia membutuhkan pemimpin dan pemimpin yang cocok adalah AS. Sementara itu Brzezinski memandang Amerika sebagai sebuah hegemon imperial masa kini dan tanpa tanding dalam kurun waktu dua puluh lima tahun ke depan (Utkin, 2002).

Pandangan mereka sejalan dengan ide Robert Kagan tentang 'hegemon Amerika yang bijak' (*the benevolent American empire*). Kagan percaya bahwa sebagai 'hegemon bijak' Amerika tidak hanya bagus buat dunia, tetapi ia juga jauh lebih baik daripada setiap alternatif realistik lainnya sehingga kehilangannya akan lebih berbahaya bagi dunia daripada bagi orang Amerika sendiri. Kagan (1998, p. 26) menegaskan hal ini dengan mengutip Samuel Huntington sepuluh tahun yang lalu: "*A world without U.S. primacy will be a world with more violence and disorder and less democracy and economic growth than a world where the United States continues to have more influence than any other country shaping global affairs.*"

Kagan tidak yakin bahwa jika ada adikuasa yang lain, maka adikuasa itu akan kurang arogan, kurang mementingkan diri sendiri, dan lebih sedikit membuat kesalahan daripada apa yang dipersangkakan kepada Amerika. Oleh karena itu, ia mengklaim bahwa jika harus ada adikuasa tunggal, dunia akan menjadi jauh lebih baik jika adikuasa itu adalah Amerika. Sebuah dunia *multipolar* yang mencerminkan semacam kesetimbangan kekuatan telah terbukti salah. Kagan merujuk pada 'masa keemasan multipolaritas' di Eropa pada abad ke-18 ketika kekuatan-kekuatan utama Eropa justru saling berperang dalam setiap dekade dari abad itu, padahal di masa itu ada sebuah 'Concert of Europe'. Kekhawatiran akan konsekuensi-konsekuensi geopolitis yang mungkin muncul bila hegemoni Amerika hilang diyakini Kagan akan membuat negara-negara lain lebih suka menjadikan multipolaritas murni sebagai pilihan terakhir mereka. Singkat kata, Kagan percaya bahwa mekanisme keseimbangan kekuatan tidak menjamin keamanan dan kemakmuran dunia sebagaimana hegemoni Amerika. Kekuatan-

kekuatan utama Eropa seperti Perancis, Russia, dan Jerman hanyalah mencari sebuah multipolaritas yang palsu ketika yang mereka kehendaki sebenarnya adalah *"the pretense of equal partnership in a multipolar world without the price or responsibility that equal partnership requires..."* (1998, pp. 32-3)

Penganjur lain dari ide 'imperium Amerika baru' adalah mantan editor *Wall Street Journal* Max Boot, kolumnis *Washington Post* Sebastian Mallaby, dan koresponden *Atlantic Monthly* Robert Kaplan. Boot, yang kini bergabung dengan *the Council on Foreign Relations* – salah satu *thinktank* konservatif paling berpengaruh di Washington saat ini – menegaskan bahwa serangan 11/9 adalah *"the result of insufficient American involvement and ambition; the solution is to be more expansive in our goals and more assertive in our implementation."* (2001, p. 27) Mallaby (2002) menegaskan bahwa mengingat ketidakstabilan dunia saat ini adalah ancaman yang sangat mendesak, maka harus ada sebuah 'kebangkitan imperialis' yang dipimpin oleh AS. Kaplan, sebagaimana dikutip oleh Walker (2002:15), menyarankan perlunya sebuah misi baru Amerika untuk membawa kemajuan dan kemakmuran ke seluruh dunia.

Apa yang mereka yakini bersama adalah sebuah 'keamanan melalui imperium': *"If your neighbors don't seem able to get their political act together, then it may be in your best interest to colonize them."* (Eland, p. 2). Meski demikian, mereka menekankan sebuah intervensi yang 'baik, ditujukan untuk membuat dunia lebih maju' daripada intervensi yang 'buruk, untuk menaklukkan dan mengeksploitasi'. Pandangan neoimperialis yang tampak 'ramah' ini juga tercermin dalam kata-kata Boot (2002), *"We don't want to enslave other countries and loot their resources. We want to liberate oppressed people and extend to them the benefits of liberal institutions"*. Lebih jauh, ia pun sejalan dengan Strategi Keamanan Nasional pemerintahan Bush yang dengan tegas menjanjikan bahwa AS akan menjadi pemimpin global untuk *"actively work to bring the hope of democracy, development, free markets and free trade to every corner of the world."* (The White House, 2002).

Aksi militer sepihak untuk melindungi kepentingan Amerika – sebagai bagian dari strategi 'imperium Amerika baru' – lebih jauh ditegaskan oleh Richard Haass, Direktur Perencanaan Kebijakan

Departemen Luar Negeri AS. Haass mengajukan pemikiran imperialisnya dengan mengatakan bahwa tanggung jawab negara untuk melindungi penduduknya dari penghancuran masal dan tidak mendukung terorisme sama sekali tidak berkaitan dengan kedaulatan. Bila ada sebuah negara yang tidak mampu memikul tanggung jawab itu, demikian Haass, maka AS adalah negara yang paling berhak mengintervensinya. Selain Haass, pemikiran imperialis juga ditunjukkan oleh penasihat senior politik luar negeri Inggris Robert Cooper (2002) dan bankir George Soros. Yang terakhir ini bahkan percaya bahwa begitu AS berkembang menjadi sebuah imperium besar, ia akan menjadi satu-satunya wasit yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah (2000, p. 53).

Bukanlah hal yang mengherankan jika sejumlah anggota pemerintahan Bush juga mempunyai pemikiran imperialis, misalnya mantan Deputy Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz (yang kini menjadi Presiden Bank Dunia), Ketua Dewan Kebijakan Pertahanan Richard Perle, dan penerbit *Weekly Standard* (yang dianggap banyak orang sebagai "*the mouthpiece of neo-conservative, imperial thinkers*") William Kristol. Begitu juga dengan Wakil Presiden Richard Cheney dan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, yang mengembangkan pemikiran imperialis sejak mereka bergabung dalam pemerintahan Bush senior. Mengulangi pendapat Kagan, Walker (2002:13) berargumen bahwa visi orang-orang ini didasarkan pada keyakinan bahwa peran hegemonik AS adalah situasi yang lebih baik yang dapat dimiliki dunia dewasa ini daripada pengaturan realistik lainnya. Tragedi 11/9 telah memberikan kepada Amerika tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan baru untuk memainkan peran yang lebih besar sebagai sebuah imperium. Dalam konteks ini, kepentingan Amerika tetap menjadi titik perhatian utama, mengingat sejauh ini Amerika enggan turut campur bila kepentingan vitalnya tidak terancam.

Menarik untuk dicatat bahwa meskipun para penganjur kestabilan hegemonik menekankan pentingnya hegemoni AS untuk mempertahankan stabilitas global, kekuatan-kekuatan utama lainnya tidak berpikir demikian. Russia dan China, yang lebih menyukai dunia yang multipolar, telah lama menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang berhak mendapatkan hegemoni atau memonopoli urusan-urusan internasional. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di tahun

1997, seorang pejabat Perancis menggambarkan posisi AS di *the North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sebagai "*fundamentally imperial*" (Volgy, Imwalle and Schwarz, 1999). Pendapat-pendapat ini mencerminkan penilaian yang lebih bijaksana terhadap kekuatan Amerika sebagaimana yang disampaikan oleh sejumlah tokoh terkemuka politik luar negeri Amerika. William Pfaff (1998/1999:9) yakin bahwa seiring dengan berjalannya waktu, akan ada banyak dan lebih banyak orang Amerika bertanya kepada diri mereka sendiri apakah mereka mempunyai cukup sumber daya moral dan intelektual untuk memainkan peran sebagai sebuah hegemon. Robert Tucker (1996:20) menilai masalah utama dari politik luar negeri Amerika adalah kontradiksi dari kehendak untuk tetap menjadi pemimpin dunia di satu sisi dan keengganan untuk memikul biayanya di sisi yang lain. George Kennan, yang digambarkan oleh Utkin sebagai "*the patriarch of American political scientists*", menegaskan bahwa mengingat dunia yang dihadapi oleh AS saat ini telah berubah secara drastis, maka kemungkinan untuk menjadi hegemon dunia tidak ada artinya bagi AS. Kennan menambahkan bahwa AS sesungguhnya tidak cukup mempersiapkan dirinya menghadapi masalah-masalah abad yang baru. Bila disimpulkan, semua pendapat di atas percaya bahwa membangun sebuah 'imperium Amerika baru' akan memaksa Amerika untuk melampaui batas-batas hegemoninya.

Menentang Strategi Imperium: dari Keseimbangan Kekuatan sampai Kejatuhan Amerika

Sebuah 'imperium Amerika baru' yang menjamin dunia yang lebih aman dan lebih makmur di bawah kepemimpinan hegemoni Amerika dengan mudahnya bisa ditolak dengan dua alasan. *Pertama*, dunia dewasa ini telah berubah sangat dramatis sehingga setiap tindakan arogan AS akan membahayakannya secara politik, diplomatik, dan ekonomi. *Kedua*, strategi imperium bukan hanya secara potensial berbiaya sangat tinggi, tetapi ia juga akan mendorong negara-negara yang dirugikan untuk menandingi kekuatan AS. Secara umum, dua alasan ini merefleksikan kenyataan yang harus diakui Amerika, yaitu bahwa ada batas-batas bagi hegemoninya sehingga setiap upaya untuk membentuk sebuah 'imperium Amerika baru' tidak ada artinya. Bahwa 'kekuasaan membutuhkan pembatas' (karena kekuasaan yang tidak

terkontrol bisa membahayakan baik stabilitas maupun kebebasan) bukanlah sesuatu yang baru, demikian argumen David Hendrickson (2002). Ia juga menambahkan, AS sebaiknya tidak melupakan bahwa kemampuannya untuk menyelesaikan setiap konflik internasional terbatas. Batas-batas hegemoni Amerika adalah basis argumen dari mereka yang menentang strategi imperialis. Para tokoh penentang mempunyai argumen yang beragam, mulai dari mereka yang menganjurkan agar AS berhati-hati dalam menjalankan hegemoninya, yang melihat bahwa strategi AS saat ini salah total, sampai pada mereka yang mengklaim bahwa kekuatan AS sesungguhnya kian berkurang.

Joseph Nye, Jr., (2002) mencatat bahwa alih-alih memperkuat tujuan dan kepentingan AS, aksi militer dan kekuatan ekonomi Amerika setelah 11/9 sesungguhnya secara potensial memperlemah tujuan dan kepentingan itu. Ini artinya penekanan kaum neoimperialis pada unilateralisme dan *exceptionalism* tidak pada tempatnya, belum lagi bila situasi politik internasional turut dipertimbangkan. *Realpolitik* menganjurkan agar selalu ada keseimbangan kekuatan di dunia ini. Bila ada satu negara yang mencoba mengubah keseimbangan itu, Nye percaya bahwa hukum alam akan secara otomatis mengelompokkan negara-negara lain dalam sebuah tim untuk bersama-sama mengembalikan keseimbangan tersebut. Bila AS menjadi negara yang menghancurkan keseimbangan dunia, ia akan menghadapi tantangan serius dari negara-negara lain yang dirugikan oleh tindakannya.

Nye membayangkan distribusi kekuatan di dunia dewasa ini sebagai sebuah 'permainan catur tiga-papan'. Papan teratas adalah papan kekuatan militer, dengan AS sebagai satu-satunya kekuatan dominan dengan kapasitas global. Bila papan teratas mungkin bersifat *unipolar*, ada multipolaritas di papan tengah. Di papan hubungan ekonomi ini, AS, Uni Eropa, Jepang, dan China secara bersama bernilai lebih dari dua pertiga ekonomi dunia. Di papan ini tampaknya tidak ada satu kotak pun yang bisa digunakan oleh AS untuk bertindak sebagai hegemon. Situasi kacau mewakili papan terbawah, yaitu papan hubungan transnasional, dimana "*beneficial transnational actors*" dan "*terrorist networks transferring means of mass destruction*" ada di antara para pemainnya. Setiap pemerintah akan menemukan bahwa kerjasama internasional adalah langkah terbaik untuk memenangkan permainan di papan ini. Apa yang hendak dikatakan Nye dengan permainan catur

tiga-papan ini sederhana: jika AS bermain di papan tengah dan papan terbawah sebagaimana ia bermain di papan teratas, ia akan kalah. Amerika haruslah menyadari bahwa ia mempunyai masalah hegemonik yang disebut oleh Nye sebagai "*the paradox of American power*": Amerika terlalu besar untuk ditantang oleh negara lain, tetapi ia tidak cukup kuat untuk dapat menyelesaikan isu-isu internasional sendirian saja

Nye menganjurkan bahwa untuk menjadi tetap kuat AS sebaiknya memusatkan diri lebih pada 'kekuatan lunak' (*soft power*) daripada 'kekuatan keras' (*hard power*)-nya.⁴ Disamping itu, ia juga menekankan pentingnya legitimasi bagi sebuah negara untuk menjalankan kekuasaannya atas negara lain; negara itu akan mendapatkan perlawanan yang lebih sedikit bila kekuasaannya dianggap sah oleh standar internasional. Dalam kata-kata Nye's (2002/3:557):

If the leading country possesses soft power and behaves in a manner that benefits others, effective countercoalitions may be slow to arise. If, on the other hand, the leading country defines its interest narrowly and uses its weight arrogantly, it increases the incentives for others to coordinate to escape its hegemony.

Ilmuwan lain juga memberikan 'putusan' mereka terhadap unilateralisme Amerika. Alih-alih memperkuat hegemoni Amerika, aksi militer sepihak hanya akan mendorong anti-Amerikanisme yang lebih luas, yang pada gilirannya akan mengancam keselamatan orang Amerika di mana saja. Sementara Noam Chomsky (Barsamian 2003:11 dan 18) menekankan bahwa AS harus memahami bahwa kebijakan sepihaknya bukan jawaban yang bagus untuk menjawab tantangan-tantangan dunia saat ini, Evelyn Goh (2002:5) mencatat bahwa 'kekuatan lunak' Amerika untuk tingkat tertentu telah dibesarkan. Ia berargumen bahwa serangan 11/9 sesungguhnya telah mengikis 'kekuatan lunak' Amerika, meski mungkin saja benar bahwa 'kekuatan keras'-nya kian diperkuat.⁵ Mengingat konsekuensi-

⁴ Argumen Nye tentang penekanan pada 'kekuatan lunak' Amerika menjadi penting ketika tantangan-tantangan dunia masa kini boleh jadi datang dalam 'bentuk-bentuk modern' seperti revolusi informasi dan globalisasi daripada *tradeoffs* militer yang 'tradisional'.

konsekuensi yang tidak diinginkan menyusul aksi militer AS kian banyak terjadi di berbagai tempat, AS sebaiknya mempertimbangkan kembali implementasi kekuatan hegemoniknya. Goh mengatakan bahwa apa yang pernah digambarkan oleh Veldrine kini menjadi '*hyper-interventionism*' ketika AS memperluas 'perang melawan teroris'-nya ke Irak. '*Hyper-interventionism*' ini bukan hanya membuat keraguan terhadap legalitas dan legitimasi tindakan AS semakin besar, tetapi ia juga mengikis imaji AS sebagai sebuah 'hegemon yang ramah'.

Merespon seruan Kagan bagi sebuah '*imperium Amerika*', Charles Maynes (1998:39-47) berpendapat bahwa perwujudan '*imperium Amerika*' mempunyai setidaknya empat alangan: biaya domestik, dampak terhadap ciri khas Amerika, penentangan internasional, dan hilangnya kesempatan (untuk membangun dunia). Memperluas hegemoni hanya akan membuat warga AS membayar lebih banyak pajak yang akan digunakan untuk pengeluaran militer, dan sebagai konsekuensinya anggaran belanja lain yang lebih penting (khususnya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan) semakin dikurangi. Dalam konteks biaya domestik, bukan hanya uang yang menjadi masalah, tetapi juga nyawa manusia – yang membuat pemerintahan Bush kini sulit menjelaskan kepada keluarga-keluarga Amerika yang kehilangan anggotanya di Afghanistan ataupun Irak. Ciri khas Amerika juga mendapat pukulan telak, ketika tampak jelas bahwa demokrasi Amerika 'membolehkan' pemimpin mengorbankan rakyat demi kepentingan mereka sendiri. Unilateralisme Amerika – bahwa Amerika 'lebih sering memberi perintah dan kurang mendengarkan pihak lain' – telah membuat AS kehilangan dukungan internasional di banyak arena. Semua ini pada gilirannya akan membuat AS membayar biaya termahal dari semua tindakannya: AS boleh jadi tidak lagi diakui sebagai salah satu pemain utama dalam politik dan ekonomi internasional. Bila AS mengejar hegemoni dunia, maka ia akan menyaksikan munculnya banyak pesaing, yang beberapa di antaranya mungkin kelak akan berhasil melampaui kekuatan AS. Tentu hal ini merupakan kerugian

⁵ Goh lebih jauh berargumen (p. 18) bahwa konsekuensi-konsekuensi 11/9 akan membatasi kekuatan AS dalam bentuk "*increased friction and costs in dealing with its allies and other friendly states*" dan "*rising public unwillingness to pay the more extreme price of external interventions*".

besar bagi AS dalam menciptakan sebuah tatanan dunia baru dan (semoga) adil.

Strategi imperialis akan membawa banyak dampak negatif ("imperial overstretch" dalam kata-kata Paul Kennedy) yang nantinya akan mengikis kekuatan hegemonik Amerika. Strategi ini mungkin saja akan mengakibatkan maraknya penyebaran senjata pemusnah massal yang kian meluas. Mengingat selalu ada kekuatan-kekuatan utama di dunia ini, yang beberapa di antaranya mungkin bisa menandingi kekuatan dominan, maka sang kekuatan dominan akan kelelahan mempertahankan supremasinya. Menggambarkan strategi imperialis sebagai "*habitually self-defeating*", Eland (2002:6) berargumen bahwa strategi itu tidak akan membuat Amerika lebih aman atau lebih kaya:

(T)he massive amount of U.S. taxpayer dollars spent unnecessarily on excessive military power to police the world and to conduct nation-building missions certainly does not pay for itself in any benefits to the United States from increased overseas trade or investment because of fewer disruptive wars or from increased economic and commercial concessions from protected nations. The first goal of any government should be to ensure the safety and well being of the people. Adopting a strategy of empire is actually counterproductive to those ends.

Para pendukung hegemoni percaya bahwa AS akan menjadi sebuah contoh bagus hegemoni di abad ke-21. Menurut Layne (1998:13-4), kepercayaan di atas didasarkan pada tiga alasan. *Pertama*, kesetimbangan kekuatan hanya akan terjadi bila kekuatan-kekuatan utama menyeimbangkan diri mereka terhadap suatu kekuatan dominan 'yang mengancam'. Mengingat AS adalah sebuah hegemon yang 'ramah', bukan 'mengancam', maka tidaklah penting untuk mempunyai keseimbangan kekuatan. Masih dalam konteks 'keramahan' ini, alasan *kedua* mengatakan bahwa alih-alih mengimbangi AS, kekuatan-kekuatan utama akan bersekutu dengannya. Dan *ketiga*, 'kekuatan lunak' AS berupa nilai-nilai dan budaya demokrasi liberal telah menjadi pembenar bagi kekuatan hegemoniknya. Pendek kata, ketiga alasan itu mengasumsikan bahwa perdamaian dan stabilitas internasional paling baik diatur dengan 'mutualisme simbiosis' antara kekuatan hegemonik AS di satu sisi dan kemauan negara-negara lain untuk menerima kepemimpinan Amerika di sisi yang lain. Meski

demikian, Layne (pp. 20-1) mengkritik asumsi itu dengan mengatakan bahwa alasan-alasan tersebut menyepelekan konsep dasar dari kekuasaan:

The conviction that America can be a successful hegemon is self-serving-and wrong. No state can afford to base its security on trust in others' good intentions. Intentions are ephemeral; today's peaceful intentions may turn malevolent tomorrow. That is why states rest their strategies on the estimates of others' capabilities; that is, of their power (actual or latent). It is a would-be hegemon's formidable power capabilities that worry others.

Layne meyakini bahwa AS tidaklah berbeda bila dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan utama lainnya dalam sejarah, yaitu bahwa hegemoninya akan membangkitkan kekuatan-kekuatan utama lain dan upaya mereka mengimbangi kekuatan Amerika. Oleh karena itu, menjadi hegemon bukanlah pilihan yang tepat bagi Amerika. Amerika tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan dominasinya sehingga strategi hegemoni tidak akan membuat kepentingan AS terlayani. Mengingat akan semakin sulit, berbahaya, dan mahal bagi AS untuk mempertahankan kontrolnya atas sistem politik dan ekonomi dunia, Layne menawarkan strategi "*offshore balancing*" – 'kekuatan keras' AS hanya dijalankan dalam lingkup teritorial yang sempit – sebagai pilihan terbaik menggantikan strategi hegemoni.

Kemudian, ada juga orang seperti Immanuel Wallerstein, yang berpendapat bahwa meskipun AS masih memegang supremasi, perannya sebagai kekuatan global sesungguhnya telah semakin menurun sejak dekade 1970-an, ditandai dengan kealahannya di Perang Vietnam. Menurut Wallerstein, apa yang terjadi setelah serangan 11/9 sebenarnya justru semakin menurunkan kekuatan militer, politik, dan ekonomi Amerika. Dengan menilai empat kasus yang digambarkannya sebagai wujud kekuatan AS yang kian menurun (Perang Vietnam, Revolusi 1968 di Eropa timur, runtuhnya Tembok Berlin di tahun 1989, dan serangan 11/9), Wallerstein menyimpulkan bahwa Amerika sekarang adalah "*a lone superpower that lacks true power, a world leader nobody follows and few respect, and a nation drifting dangerously amidst a global chaos it cannot control.*" Ia lebih jauh berargumen bahwa bila Bush berniat melanjutkan kebijakan neo-imperialisnya, Amerika akan mengalami kejatuhan yang jauh lebih dalam di dekade kedua abad ke-21 (Wallerstein, 2002:68)

Bagaimanapun juga, peluang AS untuk mempertahankan peran kepemimpinannya sebagai 'hegemon yang ramah' tetap terbuka bila ia mempertimbangkan kembali strategi imperialisnya. Untuk tetap menjadi 'pemimpin bangsa-bangsa demokratis', Amerika sebaiknya juga mempertimbangkan untuk membangun sebuah strategi baru yang tidak hanya mendorong multilateralisme, tetapi juga memperlihatkan politik luar negeri yang 'dibimbing oleh nilai moral' (Brutents, 2000: 75-6; Hirsh, 2002:22). Juga, apa yang dilakukan oleh AS dengan unilateralisme dan strategi imperialisnya sebaiknya jangan sampai membuat ia melupakan kepeduliannya akan perjuangan demokrasi (Carothers, 2003:96). Sebagaimana ditegaskan oleh Chace (2002:8), era dominasi Amerika yang tiada tanding akan sangat tergantung pada kemauannya untuk mengusahakan tujuan-tujuan bersama demi kepentingan komunitas internasional.

Penutup

Pertanyaan mengenai postur mana yang akan diambil oleh politik luar negeri Amerika – hegemon yang 'ramah' ataukah 'agresif' – tetap menjadi salah satu kepedulian utama di dunia saat ini. Sampai pada tingkat tertentu, pertanyaan ini terjawab sebagian oleh kecenderungan kuat AS untuk bertindak secara sepihak dalam mempertahankan apa yang dipandanginya sebagai kepentingan nasional. Fakta bahwa AS sekarang ini adalah kekuatan militer dan ekonomi terkuat di dunia memberikan pembenaran kepadanya untuk memaksimalkan strategi hegemoninya. Postur ini segera mendapat banyak kritik, yang utamanya menekankan bahwa ada batas-batas kekuasaan yang harus diakui oleh Amerika. Dunia telah berubah secara dramatis, membuat upaya AS untuk mempertahankan kekuasaannya tidak lagi semudah sebelumnya. Sejalan dengan itu, kenyataan bahwa sebuah Amerika yang kuat masih dibutuhkan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia sebaiknya dipertimbangkan dengan hati-hati.

Dalam artikelnya yang berjudul 'Bush's Choice: Athens or Sparta', Martin Walker (2001) menulis sebuah analogi yang bagus dengan membandingkan hegemoni AS saat ini dengan dua negara-kota Yunani kuno. Ia mengatakan bahwa AS bisa memilih antara strategi Athena atau Sparta dalam membangun strategi besarnya di abad ke-21. Sebagai Athena, AS akan lebih terbuka dalam mempromosikan demokrasi dan

perdagangan bebas-dan-adil serta lebih memperhatikan multilateralisme dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia – semuanya demi kepentingan seluruh masyarakat dunia. Amerika sebagai Sparta adalah kebalikannya: ia akan lebih proteksionis dalam perdagangan dan cenderung bertindak secara sepihak dengan supremasi militernya – semua untuk melayani apa yang diklaim para pemimpinnya sebagai kepentingan nasional AS. Perdebatan tentang strategi politik luar negeri seperti diperlihatkan di esai ini mencerminkan pilihan-pilihan AS, apakah ia akan menjadi seperti Athena atau Sparta. Jawabannya sejauh ini cukup jelas, bahwa AS lebih cenderung mengambil banyak tindakan sepihak dalam politik luar negerinya. Meski demikian, Walker juga mencatat bahwa jika Amerika mengabaikan secara total pilihan kedua (menjadi Athena), maka kepentingan nasionalnya tidak pelak lagi berada dalam bahaya besar.

Baik mereka yang mendukung strategi imperial maupun mereka yang mengingatkan bahwa AS sebaiknya tidak melampaui batas-batas hegemoninya akan mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Bila harus ada pemenang, maka pemenangnya adalah yang argumennya paling mampu meyakinkan para pemimpin dan mayoritas rakyat Amerika. Sejarah akan mencatat apakah AS tetap menjadi adikuasa tunggal di dunia dalam waktu dua puluh atau tiga puluh tahun kemudian, ketika sejumlah kekuatan utama diprediksikan akan mengimbangi hegemoni Amerika. Sampai waktu itu tiba, Washington sebaiknya menyadari bahwa menjadi hegemon seperti Sparta adalah hal terakhir yang diinginkan oleh dunia. *****

Daftar Pustaka

- Barry, T. dan Lobe, J. (2002). 'U.S. Foreign Policy – Attention, Right Face, Forward March', *Foreign Policy in Focus Policy Report*, April, <<http://fpif.org/pdf/reports/right2002.pdf>>.
- Barsamian, D. (2003). 'Imperial Ambition' (interview with N. Chomsky), *Monthly Review*, 55/1, May.

- Boot, M. (2001). 'The Case for American Empire', *Weekly Standard*, October 15.
- Boot, M. (2002). 'The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power,' dialogue with J. Gibney, *Slate*, 8 May, <<http://www.slate.msn.com/id/2065505>>.
- Brutents, K. (2000). 'In Search of Pax Americana (II)', *Russian Social Science Review*, 41/3, May-June.
- Carothers, T. (2003). 'Promoting Democracy and Fighting Terror', *Foreign Affairs*, 82/1, January/February.
- Chace, J. (2002). 'Imperial America and the Common Interest', *World Policy Journal*, 19/1, Spring.
- Cooper, R. (2002). 'Why We Still Need Empires', *The Observer*, 7 April.
- Covarrubias, J.A. (2003) *The United States: Reluctant Sheriff or Potential Hegemon?* May 28, <http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2003_04-06/covarrubias_us/covarrubias_us.html>.
- Eland, I. (2002). 'The Empire Strikes Out: The "New Imperialism" and Its Fatal Flaws,' *Policy Analysis*, No. 459, November 26, <<http://www.cato.org/pubs/pas/pa459.pdf>>.
- Foster, J.B. (2003). 'Imperial America and War', *Monthly Review*, 55/1, May.
- Goh, E. (2002). *Hegemonic Constraints: The Implications of September 11 for American Power*, IDSS Working Paper No.34, October, <<http://www.ntu.edu.sg/idss/WorkingPapers/WP34.pdf>>.
- Granger, G. (2003). *The Paradox of Unilateralism*, May 20, <http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2003_04-06/granger_paradox/granger_paradox.html>.
- Hendrickson, D.C. (2002). 'Toward Universal Empire: The Dangerous Quest for Absolute Security,' *World Policy Journal*, 19/3, Fall.

- Hirsh, M. (2002). 'Bush and the World', *Foreign Affairs*, 81/5, September/October.
- Ikenberry, G.J. (1989). 'Rethinking the Origins of American Hegemony', *Political Science Quarterly*, 104/3, Fall.
- Ikenberry, G.J. (2001). 'Getting Hegemony Right', *The National Interest*, No.63, Spring.
- Ikenberry, G.J. dan Kupchan, C.A. (1990). 'The Legitimation of Hegemonic Power', in D.P. Rapkin (ed.), *World Leadership and Hegemony*, Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Kagan, R. (1998). 'The Benevolent Empire', *Foreign Policy*, No. 111, Summer.
- Kelly, P. (2003). 'Imperial US stares into growing abyss', *The Australian*, 26 February.
- Kindleberger, C. (1981). 'Dominance and Leadership in the International Economy', *International Studies Quarterly*, No. 25, June.
- Kolko, G. (2003). 'The Perils of Pax Americana', *The Australian*, 13 January.
- Krasner, S. (1976). 'State Power and the Structure of International Trade', *World Politics*, No. 28, April.
- Lansford, T., Watson, R. dan Hilliard, B. (2003). *Foreign Policy in the Bush Administration: An Early Report Card*, May 30, <http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2003_04-06/conf_intro/conf_intro.html>.
- Layne, C. (1998). 'Rethinking American Grand Strategy: Hegemony or Balance of Power in the Twenty-First Century?', *World Policy Journal*, 15/2, Summer.
- Loh, A.A. (1999). *A Stripped-Down Conception of Hegemony*, Weatherhead Center for International Affairs Working Paper Series 99-10, Harvard University, August, <<http://www.ciaonet.org/wps/loa01/index.html>>.

- Mallaby, S. (2002). 'The Reluctant Imperialist: Terrorism, Failed States, and the Case for American Empire', *Foreign Affairs*, 81/2, March–April.
- Maynes, C.W. (1998). 'The Perils of (and for) an Imperial America', *Foreign Policy*, No. 111, Summer.
- Morgenthau, H.J. (1967). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 4th ed., New York: Alfred Knopf.
- Nye, Jr., J.S. (2002). *The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone*, New York: Oxford University Press.
- Nye, Jr., J.S. (2002/03). 'Limits of American Power', *Political Science Quarterly*, 117/4, Winter.
- Pfaff, W. (1998/99). 'The Coming Clash of Europe with America', *World Policy Journal*, 15/4, Winter.
- Rapkin, D.P. (1990). 'The Contested Concept of Hegemonic Leadership', in D.P. Rapkin (ed.), *World Leadership and Hegemony*, Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Soros, G. (2000). 'The Age of Open Society', *Foreign Policy*, No. 119, Summer.
- The White House (2002). *President's State of Union Address*, January 29, <<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html>>.
- The White House (2002). *The National Security Strategy of the United States of America*, September, <<http://whitehouse.gov/nsc/nss.pdf>>.
- Tucker, R. (1996). 'The Future of a Contradiction', *National Interest*, No. 43, Spring.
- Utkin, A. (2002). 'America: Imperial Ambitions Rekindled', *International Affairs: A Russian Journal*, No. 5, <http://www.ciaonet.org/olj/iarj/iarj_02_05b.html>.

- Volgy, T.J., Imwalle, L.E. dan Schwarz, J.E. (1999). 'Where is the New World Order? Hegemony, State Strength, and Architectural Construction in International Politics', *Journal of International Relations and Development*, 2/3, September, <http://ciaonet.org/olj/jird/jird_99vot01.html>.
- Walker, M. (1996). 'The New American Hegemony', *World Policy Journal*, 13/2, Summer.
- Walker, M. (2001). 'Bush's Choices: Athens or Sparta', *World Policy Journal*, 18/2, Summer.
- Walker, M. (2002). 'America's Virtual Empire', *World Policy Journal*, 19/2, Summer.
- Wallerstein, I. (2002). 'The Eagle Has Crash Landed', *Foreign Policy*, No. 131, July-August.